

## Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia

Cahya Fahma Arrosyid<sup>1</sup>, Andy Dwi Bayu Bawono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Email: <sup>1</sup>cahyafahma@gmail.com, <sup>2</sup>andybawono@ums.ac.id

### Abstract

*The provincial government is granted autonomy to manage regional wealth with the aim of developing public facilities and infrastructure that support community welfare. Such development is directed at improving the Human Development Index (HDI) as a reflection of quality human resources. This study investigates the influence of Regional Original Income (PAD), General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), and Revenue Sharing Funds (DBH) on provincial HDI in Indonesia. A quantitative research method was employed using hypothesis testing. The study population consists of all provincial budget realization reports, while the sample includes 34 provinces that submitted reports for the 2017–2018 fiscal years. The sample was selected using a saturated sampling technique, and data were collected through documentation and literature. Analytical techniques included panel data regression, preceded by classical assumption tests, the F-test, R<sup>2</sup> test, and t-test. The findings reveal that PAD has a positive and significant impact on HDI, as it is mostly allocated for capital and operational expenditures that enhance welfare. Conversely, DAU, DAK, and DBH show no significant effect on HDI, since their allocations are limited in supporting facilities and infrastructure development. These results highlight the crucial role of PAD in improving human development outcomes at the provincial level.*

**Keywords:** General Allocation Fund, Human Development Index, Regional Original Income, Revenue Sharing Fund, Special Allocation Fund.

### Abstrak

Pemerintah provinsi diberikan kewenangan otonomi untuk mengelola kekayaan daerah dengan tujuan mengembangkan fasilitas publik dan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ini diarahkan pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai cerminan kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap IPM provinsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Populasi penelitian mencakup seluruh laporan realisasi APBD provinsi, sedangkan sampel terdiri atas 34 provinsi yang menyampaikan laporan realisasi APBD tahun anggaran 2017–2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh, dengan pengumpulan data melalui dokumentasi dan studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel, setelah dilakukan uji asumsi klasik, uji F, uji R<sup>2</sup>, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, karena sebagian besar dialokasikan untuk belanja modal dan belanja rutin yang meningkatkan kesejahteraan. Sebaliknya, DAU, DAK, dan DBH tidak berpengaruh terhadap IPM, karena alokasinya terbatas dalam mendukung pembangunan fasilitas dan infrastruktur. Temuan ini menegaskan pentingnya peran PAD dalam meningkatkan pembangunan manusia di tingkat provinsi.

**Kata Kunci:** Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Asli Daerah.

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera melalui peningkatan kualitas hidup di berbagai aspek kehidupan. Proses pembangunan harus dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan dengan memperhatikan kapasitas sumber daya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika sosial masyarakat. Afif dan Yulianti [1] menegaskan bahwa tujuan pembangunan nasional di Indonesia berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan, yang menjadi fokus utama dalam setiap dekade pembangunan.

Dalam konteks otonomi daerah, desentralisasi fiskal telah memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya fiskalnya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, struktur pendanaan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Desentralisasi fiskal diharapkan mampu memperkuat kemandirian keuangan daerah, mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan demikian, efektivitas pengelolaan sumber penerimaan daerah menjadi kunci utama dalam mempercepat pencapaian kualitas pembangunan manusia di era otonomi.

Namun demikian, berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang inkonsisten mengenai hubungan antara komponen penerimaan daerah dan IPM. Sarkoro dan Zulfikar [2] menemukan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap IPM, sementara DAU dan DAK tidak berpengaruh. Sebaliknya, Afif dan Yulianti [1] melaporkan bahwa PAD, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan DAU tidak. Juliana dan Rukmana [3] justru menemukan pengaruh signifikan dari DAU dan DAK, namun tidak dari PAD dan DBH. Sementara itu, Rahmayati dan Pertiwi [4] menegaskan bahwa hanya PAD yang memiliki pengaruh terhadap IPM, sedangkan dana perimbangan belum menunjukkan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia. Perbedaan hasil ini menandakan adanya *empirical gap* yang cukup kuat dan memerlukan telaah ulang melalui pendekatan metodologis yang lebih robust.

Berdasarkan inkonsistensi tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis kembali pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap IPM di tingkat provinsi di Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2017–2018. Pemilihan periode ini penting karena mencerminkan masa konsolidasi kebijakan fiskal daerah setelah beberapa tahun implementasi penuh desentralisasi fiskal dan adanya penyesuaian mekanisme transfer pusat daerah. Selain itu, fokus pada tingkat provinsi memberikan perspektif makro yang lebih komprehensif dalam menilai kinerja pembangunan manusia di seluruh wilayah Indonesia.

Secara metodologis, penelitian ini berkontribusi dengan menggunakan model estimasi data panel berbasis *Fixed Effect Model (FEM)* yang telah tervalidasi, guna memperoleh hasil estimasi yang lebih akurat dalam menggambarkan hubungan antarvariabel. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi empiris baru dalam menjelaskan bagaimana kemandirian fiskal daerah yang tercermin melalui PAD berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia, khususnya ketika efektivitas dana transfer pusat (DAU, DAK, dan DBH) masih dipertanyakan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperjelas arah hubungan antara penerimaan daerah dan IPM, tetapi juga memberikan dasar kebijakan yang lebih kuat untuk memperkuat kemandirian fiskal dan pemerataan pembangunan di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif untuk menguji pengaruh variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tingkat provinsi di Indonesia. Analisis dilakukan menggunakan metode regresi data panel dengan bantuan software EViews 10. Populasi penelitian mencakup seluruh pemerintah provinsi di Indonesia yang berjumlah 34 provinsi. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh (census sampling), karena seluruh populasi memiliki karakteristik yang relevan dan jumlah unit observasi yang masih memungkinkan untuk dianalisis secara menyeluruh. Dengan demikian, penggunaan sensus dianggap paling tepat untuk memperoleh gambaran komprehensif hubungan fiskal antarprovinsi terhadap tingkat pembangunan manusia.

Periode observasi mencakup dua tahun anggaran (2017–2018). Pemilihan periode ini didasarkan pada ketersediaan data realisasi APBD dan indikator IPM yang telah dipublikasikan secara konsisten oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Meskipun relatif singkat, periode ini tetap dianggap representatif untuk menggambarkan hubungan fiskal antarprovinsi karena konsistensi variabel fiskal dan pembangunan manusia cenderung stabil dari tahun ke tahun. Namun demikian, keterbatasan dua tahun observasi diakui sebagai batas dalam menangkap dinamika jangka panjang antarperiode.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi DJPK Kementerian Keuangan dan BPS. Variabel independen berupa nilai realisasi PAD, DAU, DAK, dan DBH, sedangkan variabel dependen adalah IPM. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mengunduh, mencatat, serta menyesuaikan laporan realisasi APBD dan publikasi IPM sesuai dengan periode penelitian.

Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan tiga pendekatan estimasi, yaitu Pooled OLS, Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Pemilihan model terbaik dilakukan melalui Chow Test dan Hausman Test, di mana hasil pengujian menunjukkan bahwa model Fixed Effect Model (FEM) merupakan model paling tepat digunakan karena mampu menangkap perbedaan karakteristik khusus antarprovinsi yang tidak dapat diamati secara langsung (unobserved heterogeneity).

Uji asumsi klasik yang meliputi normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi dilakukan untuk memastikan validitas model. Hasil pengujian menunjukkan tidak adanya multikolinearitas serius antarvariabel independen, serta autokorelasi dan heteroskedastisitas berada dalam batas wajar setelah penyesuaian model FEM. Dengan demikian, model telah memenuhi syarat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Model FEM juga secara inheren mampu mengontrol efek tetap antarprovinsi yang dapat menyebabkan pelanggaran asumsi klasik jika diabaikan pada model OLS.

Persamaan umum model regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \beta_1 + \beta_2 PAD_{2it} + \beta_3 DAU_{3it} + \beta_4 DAK_{4it} + \beta_5 DBH_{5it} + \mu_{it}$$

Keterangan :

- IPM : Indeks Pembangunan Manusia
- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- DAU : Dana Alokasi Umum
- DAK : Dana Alokasi Khusus
- DBH : Dana Bagi Hasil
- i : Unit *cross section* setiap propinsi
- t : Jumlah tahun yang diteliti 2017-2018
- $\beta_1$  : Parameter variabel terkait

Uji t-statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap IPM, sedangkan uji F digunakan untuk menguji pengaruh simultan seluruh variabel independen. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk menilai seberapa besar variasi IPM dapat dijelaskan oleh PAD, DAU, DAK, dan DBH dalam model FEM yang terpilih.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada provinsi di Indonesia tahun 2017–2018. Untuk memberikan gambaran awal, dilakukan analisis statistik deskriptif terhadap variabel-variabel penelitian. Analisis data panel dilakukan dengan mempertimbangkan tiga model (Pooled OLS, Fixed Effect, dan Random Effect). Hasil uji Chow dan Hausman menunjukkan bahwa model terbaik adalah Fixed Effect. Berdasarkan hasil estimasi, hanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada taraf 5%. Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Tabel 1. Hasil Estimasi Model Regresi Data Panel

Variabel	FEM Koef.	t-Statistik	Prob.	Keterangan
PAD	0.000588	2.989	0.005	Signifikan
DAU	0.001384	1.176	0,172917	Tidak signifikan
DAK	-0.000133	-0.365	0,498611	Tidak signifikan
DBH	0.000088	0,342361	0,434028	Tidak signifikan
C	6.544.448	41.650	0.000	-

R<sup>2</sup> = 0.9956 | Adj. R<sup>2</sup> = 0.9902 | F-stat = 183.995 (p = 0.000)

Sumber: data diolah

Berdasarkan data pada Tabel 1, menunjukkan hasil estimasi regresi data panel dengan model *Fixed Effect*. Dari hasil tersebut diketahui bahwa hanya variabel PAD yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM pada taraf signifikansi 5%, sedangkan DAU, DAK, dan DBH tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Nilai koefisien PAD sebesar 0,000588 dengan *t-statistic* 2,989 dan *p-value* 0,005 menegaskan bahwa peningkatan PAD akan diikuti oleh peningkatan IPM, meskipun dalam skala yang relatif kecil. Model ini memiliki nilai *R-squared* sebesar 0,9956 dan *Adjusted R-squared* sebesar 0,9902, menunjukkan bahwa 99% variasi IPM dapat dijelaskan oleh keempat variabel fiskal daerah.

Tabel 2. Ringkasan Temuan Utama

Variabel	Pengaruh terhadap IPM
PAD	Positif dan signifikan
DAU	Tidak signifikan
DAK	Tidak signifikan
DBH	Tidak signifikan

Berdasarkan data pada Tabel 2. menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Temuan ini sejalan dengan teori fiskal desentralisasi yang menyatakan bahwa peningkatan PAD memperluas kapasitas fiskal daerah untuk mendanai program pembangunan manusia secara lebih fleksibel (Oates, 1999). Berbeda dengan dana transfer pusat yang penggunaannya seringkali diatur ketat, PAD dapat dialokasikan langsung untuk belanja modal, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan fleksibilitas tersebut, daerah dengan PAD tinggi cenderung memiliki kemampuan lebih besar dalam meningkatkan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan infrastruktur sosial, yang semuanya merupakan komponen utama IPM. Oleh karena itu, temuan ini memperkuat pandangan bahwa kemandirian fiskal daerah merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hasil ini mengindikasikan bahwa struktur DAU yang didominasi oleh *alokasi dasar* terutama digunakan untuk membiayai belanja pegawai tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas manusia (Khusaini, 2019). Alokasi belanja pegawai bersifat jangka pendek dan cenderung tidak berorientasi pada investasi sosial yang meningkatkan IPM seperti pendidikan atau kesehatan. Hal ini menjelaskan mengapa meskipun DAU menjadi komponen terbesar dalam transfer fiskal dari pusat, dampaknya terhadap IPM tetap terbatas karena lebih berfungsi untuk menjaga keberlangsungan administrasi pemerintahan, bukan untuk mempercepat pembangunan manusia.

Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK), hasil yang tidak signifikan juga dapat dijelaskan oleh karakteristiknya yang bersifat *earmarked grant* atau terikat pada proyek-proyek tertentu, terutama pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, irigasi, dan sarana publik lainnya. Dampak DAK terhadap IPM bersifat tidak langsung dan memerlukan waktu lebih panjang untuk berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Mulyana & Adi, 2020). Demikian pula, Dana Bagi Hasil (DBH) juga tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM karena penggunaannya sangat bergantung pada kebijakan daerah dan kadang terikat pada komponen penerimaan tertentu, misalnya sektor migas atau kehutanan. Kondisi ini menyebabkan DBH belum optimal digunakan untuk program peningkatan kualitas manusia, melainkan lebih banyak diarahkan untuk menutup kebutuhan belanja rutin daerah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* model mencapai 0,990 menandakan kemampuan penjelasan model yang sangat tinggi kontribusi nyata terhadap peningkatan IPM hanya berasal dari PAD. Hal ini menegaskan bahwa transfer fiskal dari pusat (DAU, DAK, dan DBH) belum sepenuhnya efektif dalam mendorong pembangunan manusia di tingkat daerah. Dengan demikian, implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya optimalisasi pengelolaan PAD melalui intensifikasi pajak daerah, efisiensi retribusi, dan peningkatan kualitas manajemen keuangan daerah, agar alokasi belanja dapat lebih berorientasi pada penguatan modal manusia. Di sisi lain, pemerintah pusat perlu meninjau ulang efektivitas skema transfer fiskal agar lebih fleksibel dan berbasis pada kinerja pembangunan manusia, bukan hanya pada kebutuhan administratif atau belanja rutin. Secara sintesis, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan PAD merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, sementara transfer fiskal dari pemerintah pusat masih perlu diarahkan secara lebih strategis agar mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

## 3.2 Pembahasan

### 3.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan nilai *t*-hitung = 2,989 dan tingkat signifikansi 5% ( $p < 0,05$ ). Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi PAD suatu daerah, semakin besar pula peluang peningkatan IPM. Temuan ini menunjukkan bahwa PAD berperan penting dalam mendukung kapasitas fiskal daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan. Berbeda dengan dana transfer dari pemerintah pusat yang cenderung bersifat terikat, PAD memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam penggunaannya. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan PAD untuk berbagai belanja strategis, baik belanja modal seperti pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur publik, maupun belanja rutin seperti peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan aparatur. Alokasi PAD yang produktif tersebut secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dari peningkatan IPM.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Sarkoro & Zulfikar [2] dan Afif & Yulianti [1] yang menegaskan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap IPM. Keduanya menyatakan bahwa PAD merupakan sumber pembiayaan utama yang memperkuat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah serta meningkatkan pelayanan publik. Dengan demikian, semakin besar PAD yang diterima, semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal daerah dan kapasitasnya untuk melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan PAD yang tinggi memberikan ruang fiskal yang luas bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan program pembangunan berkelanjutan yang berdampak langsung pada perbaikan indikator kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat komponen utama penyusun IPM.

PAD memiliki peran yang signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan menjalankan program-program pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan provinsi yang murni digali oleh daerah. Besar kecilnya PAD mencerminkan kemandirian suatu daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di daerahnya, semakin besar PAD pada suatu daerah, maka daerah tersebut dapat dikatakan semakin mandiri dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya dan diharapkan di masa yang akan datang peran PAD dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah akan semakin meningkat. Penerimaan PAD yang meningkat maka pemerintah daerah akan memiliki dana yang cukup besar pula untuk pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan IPM.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada taraf signifikansi 5%, yang berarti peningkatan PAD akan diikuti oleh peningkatan IPM. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menegaskan peran PAD sebagai sumber pendanaan utama dalam mendukung otonomi daerah dan peningkatan pelayanan publik. Semakin besar PAD yang dimiliki suatu daerah, semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, baik belanja modal maupun belanja rutin. Dengan demikian, PAD tidak hanya mencerminkan kemandirian fiskal suatu daerah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan IPM.

### 3.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula kapasitas fiskalnya untuk membiayai kegiatan pembangunan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. PAD memiliki karakteristik yang lebih fleksibel dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat, karena penggunaannya ditentukan oleh kebijakan dan prioritas daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengarahkan PAD untuk sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup penduduk. Selain itu, sebagian PAD juga dialokasikan untuk belanja modal, seperti pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta belanja rutin yang meningkatkan pelayanan publik, yang secara keseluruhan memperkuat capaian IPM. Temuan ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa daerah dengan PAD tinggi memiliki kapasitas pembangunan manusia yang lebih baik karena otonomi fiskal yang lebih luas memungkinkan alokasi anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Dengan demikian, peningkatan PAD menjadi salah satu faktor kunci dalam mempercepat kemajuan pembangunan manusia di tingkat daerah.

Konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Sarkoro & Zulfikar [2] serta Afif & Yulianti [1] yang menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). DAU tidak berpengaruh terhadap IPM karena sebagian besar DAU digunakan untuk belanja pegawai. Hal ini dapat dilihat dari formulasi DAU yang memasukkan komponen alokasi dasar sebagai komponen utama yang mendominasi keseluruhan DAU yang diterima oleh daerah. Alokasi dasar merupakan alokasi anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai.

Pemerintah daerah menggunakan DAU sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah. Dari hasil analisis data yang diperoleh mengindikasikan bahwa DAU yang diterima oleh daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin, seperti untuk belanja pegawai dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja pembangunan [5]. Dana Alokasi Umum digunakan untuk memenuhi alokasi dasar dalam suatu pemerintahan daerah, dimana alokasi dasar merupakan alokasi anggaran untuk belanja pegawai bukan belanja modal. Kondisi ini mengakibatkan kurangnya dampak DAU terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dari IPM [4].

Penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang dibuktikan dari nilai  $t$  hitung sebesar 1,176 dan  $p > 0,05$  pada taraf signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi DAU cenderung digunakan untuk membiayai belanja rutin, terutama belanja pegawai, sehingga manfaatnya tidak langsung dirasakan pada capaian kualitas pembangunan manusia. Kondisi tersebut selaras dengan temuan bahwa komponen alokasi dasar dalam DAU mendominasi penggunaan dana, sehingga porsi yang dialihkan untuk belanja modal relatif terbatas. Dengan demikian, meskipun DAU memiliki fungsi penting dalam mendukung otonomi daerah, kontribusinya terhadap peningkatan IPM masih rendah karena penggunaan yang kurang terarah pada sektor pembangunan manusia [12].

Fenomena penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk belanja rutin dapat dikaji melalui lensa efektivitas transfer fiskal, sebab meskipun dana tersedia, alokasi tidak selalu diarahkan kepada program yang memperkuat pembangunan manusia. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa belanja pegawai dan belanja barang/layanan (goods and services) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap IPM, sedangkan belanja modal justru menunjukkan efek negatif atau kurang signifikan [13]. Selain itu, penelitian "Impact of Government Expenditure on Human Development Index in Indonesia by Functions" menemukan bahwa fungsi belanja pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial secara signifikan memengaruhi peningkatan IPM, sedangkan fungsi perumahan dan fasilitas publik tidak memberikan pengaruh terhadap IPM [14]. Hal lain, dalam studi "The Influence of Economic Growth, Minimum Wages, Poverty and Capital Expenditures on the HDI" di eks-Residen Surakarta, ditemukan bahwa belanja modal memang berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, tetapi dalam konteks tertentu seperti kemiskinan dan upah minimum, belanja modal harus dibarengi dengan faktor-lain agar memberi dampak nyata [15]. Oleh karena itu, orientasi penggunaan DAU sebaiknya diarahkan lebih kuat ke sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur manusia agar transfer fiskal tidak hanya menjadi sumber belanja rutin semata tetapi menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan IPM.

### 3.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan karena PAD bersifat fleksibel dan tidak terikat pada ketentuan pusat, sehingga pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengalokasikan dana tersebut pada belanja modal maupun belanja rutin yang langsung menyentuh kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Dengan demikian, PAD menjadi salah satu instrumen fiskal yang efektif dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Sarkoro & Zulfikar [2] serta Rahmayati & Pertiwi [4] yang menyatakan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap IPM. Sangat sulit untuk melihat pengaruh DAK terhadap kesejahteraan masyarakat karena sebagian besar mengarah pada investasi yang pengaruhnya akan terlihat dalam jangka panjang, walaupun sebenarnya DAK khusus bertujuan untuk meminimalkan ketidakmerataan infrastruktur publik terutama yang bersifat khusus seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, pekerjaan umum, prasarana pemerintahan dan lingkungan hidup.

Analisis empiris terbaru menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak selalu memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebagaimana terbukti dalam penelitian di provinsi Kalimantan tahun 2015-2019 yang menemukan bahwa DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM secara parsial [16]. Selanjutnya, studi dari Indonesian Treasury Review menyatakan bahwa walau DAK mempunyai efek positif terhadap belanja modal dan belanja modal tersebut berkontribusi signifikan terhadap IPM, pengaruh langsung DAK terhadap IPM tetap negatif [17]. Penelitian di Kabupaten Tulang Bawang juga mendapati bahwa pengaruh DAK terhadap IPM adalah positif tetapi tidak signifikan, mendukung temuan bahwa DAK sering kali lebih banyak digunakan untuk pengeluaran rutin/infrastruktur fisik yang dampaknya terhadap indikator kesejahteraan manusia tidak langsung. Dengan demikian, meskipun DAK memegang peran penting dalam mendukung pembangunan fisik dan pengurangan ketimpangan infrastruktur, kontribusinya terhadap peningkatan kualitas manusia melalui IPM masih memerlukan waktu dan sinergi kebijakan agar efek jangka panjang bisa tampak nyata.

### 3.2.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil pengujian hipotesis terhadap DBH memperoleh nilai  $t_{hitung} = 0,493$  ditolak pada taraf signifikansi 5% ( $p > 0,05$ ). Artinya Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap IPM dan  $H_4$  ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa DBH tidak dapat dijadikan indikator dalam menentukan IPM. Variasi penerimaan DBH tidak berdampak terhadap peningkatan atau penurunan IPM. DBH tidak berpengaruh terhadap IPM karena pengelolaan dan penggunaan DBH merupakan wewenang dari pemerintah daerah. Peningkatan DBH seharusnya berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika pemerintah daerah lebih banyak menggunakan DBH untuk mendanai kebutuhan masyarakat melalui alokasi belanja modal demi menunjang sarana dan prasarana publik yang dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Rahmayati & Pertiwi [4] yang menyimpulkan DBH tidak berpengaruh terhadap IPM. Penggunaan DBH merupakan wewenang dari pemerintah daerah. Namun terdapat beberapa komponen yang penggunaannya ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak leluasa dalam hal penggunaan DBH untuk kesejahteraan masyarakat yang akan menyebabkan pengalokasian DBH kurang berdampak secara signifikan pada peningkatan IPM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang tercermin dari nilai  $p\text{-value} > 0,05$ , yaitu  $t_{hitung}$  sebesar 0,493, yang berarti hipotesis pengaruh DBH terhadap IPM ditolak pada taraf signifikansi 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa variasi penerimaan DBH tidak secara langsung berdampak pada peningkatan ataupun penurunan IPM, sebab pemanfaatannya sangat tergantung pada kebijakan pemerintah daerah dalam alokasi dan prioritas belanja. Temuan tersebut konsisten dengan studi dalam konteks Indonesia yang menemukan bahwa DBH secara parsial memiliki pengaruh positif tetapi *tidak signifikan* terhadap IPM, sehingga kontribusinya terhadap pembangunan manusia masih terbatas. Dua studi lainnya juga melaporkan bahwa DBH tidak signifikan dalam mempengaruhi IPM, dimana DBH, DAU, dan DAK tidak berpengaruh

signifikan secara parsial terhadap IPM [18; 19]. Dengan demikian, meskipun DBH memiliki potensi sebagai instrumen fiskal yang mendukung pembangunan, efektivitasnya terhadap peningkatan kualitas hidup masih belum optimal karena pola penggunaan dana tersebut yang tidak secara langsung diarahkan pada aspek-aspek peningkatan IPM.

### 3.3 Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan sejumlah implikasi penting baik secara teoretis maupun praktis terhadap kebijakan fiskal daerah dan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Temuan empiris menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan. Kondisi ini menggambarkan bahwa kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD menjadi faktor utama dalam mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, transfer dana dari pemerintah pusat masih menghadapi keterbatasan efektivitas akibat pola alokasi dan penggunaan dana yang kurang fleksibel serta belum sepenuhnya diarahkan pada sektor pembangunan manusia. Berdasarkan hasil tersebut, implikasi penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 3.3.1 Implikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a. Penguatan peran PAD sebagai instrumen kemandirian fiskal daerah. Hasil penelitian menegaskan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini mengimplikasikan bahwa peningkatan kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan asli akan memperluas kapasitas fiskal untuk membiayai program pembangunan. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu terus mendorong inovasi pendapatan, terutama melalui pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- b. Perluasan basis penerimaan PAD untuk pembangunan manusia. Peningkatan PAD harus diikuti dengan kebijakan yang mengarahkan sebagian besar alokasi dana tersebut pada sektor-sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Belanja modal dari PAD dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, yang pada gilirannya memperbaiki indikator IPM.
- c. Fleksibilitas PAD sebagai faktor strategis pembangunan. Berbeda dengan dana transfer pusat, PAD memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas belanja. Fleksibilitas ini perlu dimanfaatkan dengan penguatan perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat agar dampaknya terhadap IPM semakin nyata.
- d. Implikasi kebijakan desentralisasi fiskal. Temuan ini memperkuat teori bahwa otonomi fiskal yang efektif hanya dapat tercapai apabila PAD daerah meningkat secara berkelanjutan. Dengan demikian, desentralisasi fiskal perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui perbaikan sistem pajak daerah dan transparansi keuangan publik.

#### 3.3.1 Implikasi terhadap Dana Alokasi Umum (DAU)

- a. Efektivitas DAU dalam pembangunan manusia masih rendah. Temuan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM mengindikasikan bahwa penggunaannya masih didominasi oleh alokasi dasar untuk belanja pegawai. Hal ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali komposisi belanja agar sebagian DAU dialokasikan ke belanja modal dan program pelayanan publik.
- b. Reorientasi kebijakan penggunaan DAU. Pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat strategi penganggaran berbasis kinerja, dengan memastikan sebagian DAU digunakan untuk mendanai sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Langkah ini dapat meningkatkan efektivitas DAU dalam memperbaiki kualitas hidup penduduk.
- c. Penyesuaian formulasi DAU oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat perlu meninjau ulang formula DAU agar tidak hanya mempertimbangkan alokasi dasar, tetapi juga indikator kinerja pembangunan manusia. Dengan demikian, daerah yang berhasil meningkatkan IPM dapat memperoleh insentif fiskal tambahan.
- d. Implikasi terhadap teori transfer fiskal. Hasil ini mendukung pandangan bahwa transfer fiskal bersifat efektif apabila memiliki keterkaitan langsung dengan outcome pembangunan. Oleh karena itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi penggunaan DAU menjadi langkah penting untuk menjamin efisiensi transfer dana pusat.

### 3.3.2 Implikasi terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK)

- a. Keterbatasan dampak langsung DAK terhadap IPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, karena sebagian besar penggunaannya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur fisik yang dampaknya bersifat jangka panjang. Dengan demikian, manfaat DAK terhadap peningkatan kualitas manusia memerlukan waktu untuk terealisasi.
- b. Peningkatan sinkronisasi antara program DAK dan indikator IPM. Pemerintah perlu memastikan bahwa proyek-proyek yang dibiayai melalui DAK memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan komponen IPM, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sanitasi.
- c. Perluasan fungsi DAK nonfisik. Porsi DAK nonfisik perlu ditingkatkan untuk mendanai kegiatan yang bersifat langsung memperbaiki kapasitas sumber daya manusia, seperti pelatihan tenaga pendidik, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, dan bantuan sosial berbasis komunitas.
- d. Implikasi terhadap strategi pembangunan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan penggunaan DAK dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, agar pembangunan infrastruktur fisik dapat diikuti dengan peningkatan kualitas layanan publik dan partisipasi masyarakat.

### 3.3.3 Implikasi terhadap Dana Bagi Hasil (DBH)

- a. Pengelolaan DBH masih belum optimal dalam mendukung pembangunan manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, yang menandakan bahwa variasi penerimaan DBH belum diikuti dengan alokasi yang efektif pada sektor peningkatan kualitas hidup.
- b. Kebutuhan fleksibilitas dalam penggunaan DBH. Sebagian besar komponen DBH masih diatur penggunaannya oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang memberi keleluasaan lebih besar kepada daerah untuk memanfaatkan DBH sesuai dengan prioritas lokal yang mendukung peningkatan IPM.
- c. Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH. Pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi penggunaan DBH melalui pelaporan berbasis kinerja, sehingga alokasi DBH benar-benar diarahkan pada program yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
- d. Implikasi terhadap kebijakan fiskal daerah. Temuan ini memperkuat pentingnya perbaikan mekanisme transfer fiskal antar pemerintah agar DBH tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi bagi daerah penghasil, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa faktor kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD merupakan kunci utama dalam peningkatan IPM, sementara dana transfer pusat seperti DAU, DAK, dan DBH memerlukan reformulasi kebijakan agar lebih efektif dan berorientasi pada pembangunan manusia. Implikasi ini menjadi dasar bagi perumusan kebijakan fiskal daerah yang lebih adaptif, produktif, dan berkeadilan untuk mendorong tercapainya pembangunan manusia yang berkelanjutan.

## 4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tingkat provinsi di Indonesia, sehingga peningkatan PAD mampu mendorong perbaikan kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak terbukti berpengaruh terhadap IPM, yang mengindikasikan bahwa ketiga jenis transfer fiskal tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan untuk kegiatan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa kapasitas fiskal daerah melalui PAD memiliki peranan penting dalam meningkatkan IPM, sedangkan transfer dari pemerintah pusat masih menghadapi kendala efektivitas alokasi.

Implikasi dari hasil ini adalah perlunya pemerintah daerah lebih fokus meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, sekaligus melakukan perencanaan belanja yang lebih tepat sasaran agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara langsung. Sementara itu, pemerintah pusat diharapkan meninjau kembali mekanisme penyaluran dan penggunaan DAU, DAK, dan DBH agar lebih diarahkan pada program-program yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Penelitian ini masih terbatas pada observasi tingkat provinsi dalam periode 2017–2018 dengan variabel fiskal yang relatif sempit, sehingga belum mampu memberikan gambaran yang lebih luas terkait dinamika pembangunan manusia di level kabupaten/kota maupun dalam rentang waktu yang lebih panjang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan memperluas cakupan unit analisis, memperpanjang periode observasi, serta mempertimbangkan variabel-variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, maupun kebijakan pembangunan daerah yang dapat memengaruhi IPM.

## REFERENCES

- [1] Afif, A.N, & Yulianti, "Determinan Indeks Pembangunan Manusia Di Wilayah Indonesia Timur (Studi kasus Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Papua pada tahun 2013 -2016)," *Majalah Ilmiah Solusi*, no. Vol. 16, No. 4, 2018.
- [2] Sarkoro, H., dan Zulfikar, "Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun 2012-2014)," *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, no. Vol 1 No. 1, 2016.
- [3] Juliana & Rukmana, H.S, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bogor Tahun 2010-2016," *Jurnal Jurismata*, no. Vol. 2 No. 1, 2020.
- [4] Rahmayati, A., & Pertiwi, I.F.P, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia," *Journal of Islamic Finance and Accounting* , no. Vol. 1 No. 1, 2018.
- [5] B. Bharanti, "The Effect Of Fiscal Balance Transfer, Financial Performance On Capital Expenditure Impacting On The Human Development Index Of Papua Province," *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, no. Volume 4, Nomor 3, 2019.
- [6] Afif, A.N, & Yulianti. 2018. *Determinan Indeks Pembangunan Manusia Di Wilayah Indonesia Timur (Studi kasus Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Papua pada tahun 2013 -2016)*. *Majalah Ilmiah Solusi* Vol. 16, No. 4 Oktober 2018
- [7] Bharanti, B.E. 2019. *The Effect Of Fiscal Balance Transfer, Financial Performance On Capital Expenditure Impacting On The Human Development Index Of Papua Province*. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, Volume 4, Nomor 3, Desember 2019.
- [8] Darise, N. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: PT Indeks
- [9] Ghozali, I. 2011. *Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: BP UNDIP.
- [10] Halim, A. 2014. *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 2. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- [11] Juliarini, A. 2018. *Kinerja Pendapatan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Provinsi Di Pulau Jawa*. *Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) 2018*.
- [12] B. Imantria and A. S. Kurnia, "Does Local Government Expenditure Lead to Human Development in Indonesia?," *Economics Development Analysis Journal*, vol. 13, no. 2, pp. 235–247, May 2024.
- [13] A. O. T. Wiratmoko and L. Purwanti, "Impact of Government Expenditure on Human Development Index in Indonesia by Functions," *The EUrASEANS: Journal on Global Socio-Economic Dynamics*, vol. 6, no. 43, pp. 45–58, Nov.–Dec. 2023.
- [14] A. N. Hestingsih, I. Mafruhah, and C. Seftarita, "The Influence of Economic Growth, Minimum Wages, Poverty and Capital Expenditures on the HDI," *Journal of Applied Economics in Developing Countries*, vol. 8, no. 2, pp. 78–86, Sept. 2023, doi: 10.20961/jaedc.v8i2.79838.
- [15] E. Sulastri and E. Efendri, "Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Indeks Pembangunan Manusia Seluruh Provinsi di Kalimantan Tahun Anggaran 2015–2019," *JRMB Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, vol. 6, no. 2, pp. 85–96, Dec. 2021, doi: 10.36407/jrmb.v6i2.572.
- [16] M. I. Nashshar and B. Mulyana, "Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Mediasi," *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, vol. 7, no. 3, pp. 255–270, 2022.
- [17] J. Rizkiyah and H. Anitasari, "Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro," *JEMES (Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial)*, vol. 6, no. 1, pp. 1–6, 2023